

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya tidak ada negara yang tidak melakukan pembangunan bagi negaranya. Pembangunan merupakan hal penting untuk meningkatkan taraf hidup serta mencapai kesejahteraan masyarakat. Namun seringkali pembangunan di artikan hanya sebatas pada pembangunan industri. Pembangunan infrastruktur dan kawasan industri sering kali menimbulkan dampak buruk pada pencemaran lingkungan. Dampak inilah yang menyebabkan kekhawatiran bagi banyak negara dunia untuk melakukan pembangunan berbasis berkelanjutan. Melalui komunitas Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah di sepakati bahwa sebuah pembangunan harus berdasarkan pada keberlanjutan atau yang disebut dengan Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Sustainable Development Goals (SDGs) terdiri dari 169 target pembangunan dan 17 tujuan yang terdiri dari; 1). Menghapus Kemiskinan; 2). Mengakhiri Kelaparan; 3). Kesehatan Yang Baik dan Kesejahteraan; 4). Pendidikan Bermutu; 5). Kesetaraan Gender; 6). Akses Air Bersih dan Sanitasi; 7). Energi Bersih dan Terjangkau; 8). Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; 9).

Infrastruktur, Industri, dan Inovasi; 10). Mengurangi Ketimpangan; 11). Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan; 12). Konsumsi dan Produksi Yang Berkelanjutan; 13). Penanganan Perubahan Iklim; 14). Menjaga Ekosistem Laut; 15). Menjaga Ekosistem Darat; 16). Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kuat; 17). Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan.



Berdasarkan pada Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017 Tentang Sistem Pembangunan Nasional, SDGs telah menjadi prioritas pembangunan nasional sekaligus menjadi landasan pembangunan di tingkat Kabupaten/Kota. Kota Batam sebagai salah satu kota yang mengadopsi keberlanjutan dalam pembangunan kotanya. Dilansir dari Media Center Batam, Wali Kota Batam Muhammad Rudi menyebutkan bahwa “konsep pembangunan Kota Batam sebagai bentuk pembangunan yang bisa dinikmati secara terus menerus berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan”. Terobosan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota

Batam adalah dengan melakukan pemulihan ekonomi (peningkatan infrastruktur) untuk menarik minat investasi baik manufaktur maupun pariwisata, pembangunan taman kota, dan kebijakan kawasan bebas gelandangan dan pengemis.

Kota Batam di desain sebagai kota industri, perdagangan, alih kapal, dan pariwisata. Pemerintah Kota Batam sangat mendukung upaya pembangunan infrastruktur sebagai pendorong keberlangsungan pertumbuhan kawasan industri seperti perbaikan jalan dan pembangunan industri pabrik. Dengan melakukan penataan jalan utama yang berada di Simpang Bareleng, Simpang Basecamp, Simpang Taiwan ke Batubesar, dan Simpang Basecamp ke Seiharapan, untuk memberikan kenyamanan dan mempermudah akses masyarakat sekaligus solusi dari masalah kemacetan.

Pembangunan infrastruktur sebagai bentuk pelayanan dasar untuk meningkatkan persaingan pada kawasan industri. Pengembangan industri di lihat dari perkembangan kawasan industri Kota Batam yang kini berjumlah 26, kawasan industri terbesar di seluruh wilayah Kota Batam dengan 1.309 industri unggul baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Industri PMA yang telah berkembang di Kota Batam diantaranya, industri logam dan mesin terdiri dari 109 perusahaan; industri kulit, karet, plastic, dan kemasan terdiri dari 85 perusahaan; industri elektronik, dan elektrika terdiri dari 77

perusahaan; industri perkepalan dan penunjang terdiri dari 66 perusahaan; dan industri migas dan penunjang terdiri dari 39 perusahaan. Melihat perkembangan industri PMA dan diiringi dengan pertumbuhan penduduk, PB Batam memanfaatkan peluang dengan membangun industri di bidang PMDN. Telah tercatat sebanyak 184 perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi, 106 perusahaan bergerak di bidang jasa industri konstruksi, 85 perusahaan bergerak di bidang industri logam dan mesin, 85 perusahaan bergerak di bidang jasa industri, dan 72 perusahaan bergerak di bidang industri perkapalan dan penunjang, yang di bangun baik di kawasan industri maupun di luar kawasan industri.

Bercermin pada kota-kota modern yang menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan/SDGs, Batam menerapkan konsep *green city* dengan membangun taman Kota Batam sekaligus bentuk dari menghargai alam dengan memberikan ruang terbuka hijau di tengah kota. Batam sebagai kota pariwisata, selain pembangunan taman Kota Batam juga harus memiliki penataan ruang kota yang baik untuk memberikan kesan positif dari para wisatawan salah satunya dengan penanganan kawasan kumuh. Melalui kebijakan kawasan bebas gelandang dan pengemis di tahun 2020 terdapat 1.627,39 hektar kawasan kumuh berkurang menjadi 1.486,1 hektar sebagai upaya pemeliharaan lingkungan pemukiman.

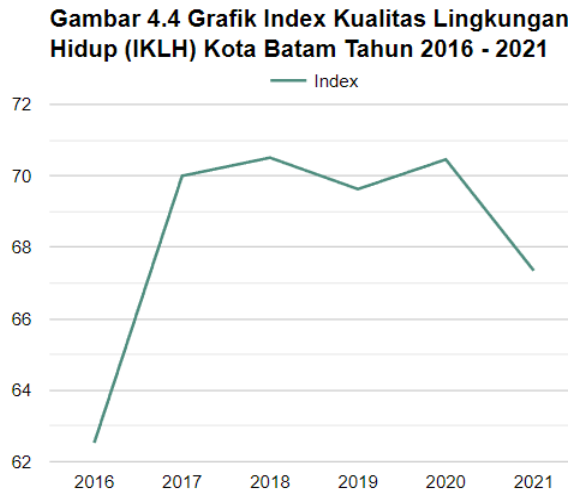
Usaha Pemerintah Kota Batam dalam pemulihan ekonomi kini membuahkan hasil. Tercatat pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Batam sebesar 4,75%. Kepala BPS Kota Batam Rahmat Iswanto menyatakan, “pertumbuhan ekonomi Kota Batam di Tahun 2021 cukup baik di bandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sebesar 3,43%, dan nasional 3,69%”. Tercatat kenaikan sektor industri pertambangan dan penggalian sebesar 7,89 persen; Industri pengadaan listrik dan gas sebesar 3,43 persen; Industri pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 3,22 persen; Industri konstruksi sebesar 6,70 persen; Industri perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 2,42 persen; Jasa keuangan asuransi sebesar 0,29 persen; Industri real estate sebesar 3,91 persen; Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial sebesar 1,42 persen. Apabila perekonomian Kota Batam di ukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maka menghasilkan nilai sebesar Rp. 172 triliun atas dasar harga berlaku, dan Rp. 111 triliun atas harga konstan.

Keberhasilan ekonomi Kota Batam dalam sektor industri memberikan lebelitas Batam sebagai julukan kota industri yang ramah investasi. Di dukung dengan letak geografis yang di rasa strategis yaitu berbatasan langsung dengan perbatasan Negara Singapura serta berada di jalur perdagangan internasional

menjadikan nilai tambah keberhasilan sektor industri Kota Batam. Akan tetapi dalam konteks pembangunan berkelanjutan/SDGs tujuan dari SDGs tidak hanya berfokus pada keberhasilan ekonomi. Dari 17 tujuan SDGs, pada point 6 (Air bersih dan sanitasi layak), 7 (Energi bersih dan terjangkau), 13 (Penanganan perubahan iklim), 14 (Ekosistem lautan), dan 15 (Ekosistem daratan) menunjukkan pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang bersinergi pada lingkungan hidup. SDGs bertujuan memberantas kemiskinan dan kelaparan, mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara/daerah, memperbaiki manajemen air dan energi serta mengambil langkah urgensi untuk mengatasi masalah perubahan iklim (Patiung, 2019).

Sebagai kota industri, berdasarkan pada kebijakan-kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Batam di atas justru kurang memperhatikan dampak lingkungan. Keberadaan industri apabila tidak di kelola dengan baik akan berdampak negatif pada lingkungan hidup seperti perubahan iklim, polusi udara, polusi air, dan merusak ekosistem. Berdasarkan data yang bersumber dari Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH), menyatakan bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Batam di tahun 2021 (67,35%) mengalami penurunan, menempati angka terendah apabila di dibandingkan dengan 4 tahun sebelumnya. Hal ini bisa di lihat dari

grafik gambar Index Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Batam Tahun 2016-2021 dibawah ini;



Sumber : Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH)
[ht. tps://silh.batam.go.id/](http://silh.batam.go.id/)

Didukung dengan adanya pencemaran air laut di pesisir pantai Pulau Batam akibat limbah minyak hitam yang berasal dari aktivitas industri kapal sekaligus berdekatan dengan jalur pelayaran internasional. Di tahun 2019 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan bahwa “pencemaran pesisir pantai Kota Batam terjadi akibat dari tumpahan limbah minyak sludge oil, yang kemudian di tangani langsung oleh BPSPL Padang Satker Tanjungpinang dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam”. Namun pencemaran limbah minyak hitam di pesisir pantai Kota Batam masih tidak kunjung usai. Per 1 desember 2022, Kompas Batam menyebutkan tumpahan minyak hitam masih mencemari pesisir

barat Pulau Batam. Pencemaran limbah minyak di pesisir tidak hanya mengganggu aktivitas pariwisata, masyarakat pesisir yang bermata pencarian sebagai nelayan juga berdampak karena kesulitan untuk mendapatkan ikan di antara air laut yang tercemar.

Pencemaran akibat aktivitas industri juga berdampak pada kualitas udara di Kota Batam. Polusi dari industri pabrik menyebabkan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Kota Batam dalam tiga tahun terakhir masuk pada kategori sedang atau di ambang sehat dan tidak sehat. Di lansir dari Tribun Batam, per Juli 2022, nilai ISPU Kota Batam mencapai 101. Sedangkan kadar udara dikatakan sehat apabila nilai ISPU berada di bawah 100. Selain dari industri pabrik, pembangunan yang sedang berjalan, pembakaran lahan hutan, dan pembakaran sampah juga menjadi sumber dari kondisi udara yang buruk.

Untuk mencapai tujuan SDGs yang berwawasan lingkungan hidup, Pemerintah Kota Batam membutuhkan strategi yang kreatif dan inovatif agar keberlanjutan lingkungan tetap terjaga di tengah lajunya aktivitas industri. Kota industri yang sensitive terhadap pencemaran lingkungan justru memberikan tantangan bagi Pemerintah Kota Batam untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan di wilayah yang rentan akan polusi lingkungan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka dapat di tarik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana tantangan Pemerintah Kota Batam dalam melakukan pembangunan berbasis SDGs yang berwawasan lingkungan hidup di kawasan industri?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah penelitian di atas, tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui bagaimana tantangan Pemerintah Kota Batam dalam melaksanakan pembangunan berbasis SDGs yang berwawasan lingkungan hidup di Kawasan industri.

1.4. Literatur Review

NO	JUDUL PENELITIAN, NAMA PENULIS DAN TAHUN TERBIT	HASIL PENELITIAN
1.	Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan Dalam Menentukan Pembangunan Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan. (Nasution, 2020)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan melalui kebijakan yang berfokus pada pengembangan kota hijau dengan keseimbangan ekologis yang memperhatikan daya dukung lingkungan yang kondusif. Keberhasilan pembangunan tidak hanya atas dasar keterlibatan satu pihak saja. Di butuhkan masyarakat, lembaga pemerintah, serta stakeholder selaku pihak-pihak yang dapat mendorong keberhasilan pembangunan. http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/4794

2.	<p>Ruang Public Dan Kota Berkelanjutan: Strategi Pemerintah Kota Surabaya Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). (Trifita & Amaliyah, 2020)</p>	<p>Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan pembangunan berkelanjutan yaitu bekerjasama United Cities Loval Government Asia-Pasific (UCLG ASPAC) melalui Global Public Space Programme (GPSP). Proyek tersebut berhasil dilakukan dengan 3 strategi yaitu perencanaan pembangunan dilakukan melalui pendekatan dan kerjasama dengan berbagai pihak pemangku kepentingan, Menggunakan sumber pengetahuan baru yang mendukung proyek, serta melakukan pembangunan proyek percontohan. Dengan mengikutsertakan masyarakat dalam berbagai aktivitas proyek seperti proses sosialisasi, pelatihan, lokakarya dan penggunaan taman. http://www.ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jg/article/view/2413</p>
3.	<p>Strategi Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan Di Kota Batu. (R. P. Putra, 2015)</p>	<p>Hasil menunjukkan bahwa status pembangunan keberlanjutan di Kota Batu dilakukan dengan analisis <i>Multi Dimensional Scarling City dengan Teknik Rapid Appraisal-Sustainable City</i> adalah cukup berkelanjutan yaitu sebesar 62,89%, dengan penilaian pada aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya, infrastruktur, dan institusional. Strategi berupa peningkatan pelayanan publik, mendukung Usaha Kecil Menengah UKM, serta pemeliharaan lingkungan hidup. http://eprints.itn.ac.id/id/eprint/11691</p>
4.	<p>Analisis Kecukupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Batam. (Putri Et Al., 2021)</p>	<p>Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Batam yaitu seluas 221.400 ha atau 32,05% dari luas daratan. RTH Kota Batam masih memenuhi batas minimum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008, yaitu minimal 30%. Area hijau terluas merupakan hutan kering sekunder yang luasnya mencapai 79.200 ha atau 11,45%. https://media.neliti.com/media/publications/446363-none-94e6db30.pdf</p>
5.	<p>Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Batu Dalam Mewujudkan Kota Pariwisata.</p>	<p>Hasil menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pemerintah Kota Batu dalam mewujudkan kota pariwisata berkelanjutan yang berwawasan lingkungan belum terlaksana secara optimal. Kurangnya komunikasi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat serta tidak terpenuhinya tiga konsep pembangunan</p>

	(Obot & Setyawan, 2017)	berkelanjutan yaitu pro ekonomi sejahtera, pro keadilan sosial dan pro lingkungan. https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1469
6.	Strategi Penanganan Pemungkiman Kumuh Kawasan DAS Metro Kota Malang Berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goals (Sdgs). (Sakdiah & Rahmawati, 2021)	Dari hasil menyebutkan bahwa kawasan DAS Metro Kota Malang belum tertangani dan tidak sustainable. Hal ini di dasari oleh banyaknya permasalahan kumuh di pemungkiman masyarakat seperti rumah illegal, bangunan tidak teratur, rumah tidak layak huni, dan memiliki kepadatan penduduk. Di dukung dengan permasalahan sarana dan prasarana publik yang kurang maksimal seperti jalanan rusak, drainase yang tidak beroperasi dengan maksimal, tidak adanya proteksi kebencanaan, belum terpenuhi ruang terbuka hijau, dan masalah lainnya. https://ejurnal.its.ac.id/index.php/teknik/article/view/56280
7.	Peran Strategi City Diplomacy Pemerintah Palembang Dalam Mewujudkan Kota Berkelanjutan Ramah Lingkungan. (Aisyah et al., 2020)	Pemerintah Kota Palembang mewujudkan kota berkelanjutan ramah lingkungan dengan melakukan peningkatan akses air bersih dan sanitasi layak. Melalui pendekatan penerusan hibah internasional yaitu berupa Hibah Air Minum dengan hasil membangun kepercayaan berupa kerjasama internasional melalui investasi infrastruktur yang di dukung oleh donor internasional dan pemerintah pusat. https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/dauliyah/article/view/4277
8.	Analisis Permasalahan, Isu Strategis Dan Kebijakan Pembangunan SDGs Kabupaten Mojokerto. (Patiung, 2019)	Segala bentuk sasaran strategis, indikator kinerja dan kebutuhan anggaran program dan kegiatan di susun dalam Reaksi Aksi Daerah (RAD). Analisis mengarah pada evaluasi kebijakan pembangunan SDGs Kabupaten Mojokerto selama 5 tahun terakhir dengan arah kebijakan pembangunan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas SDM yang potensial. Melakukan evaluasi sekaligus pemantauan dalam setiap kegiatan pemangku kepentingan yang melaksanakan SDGs. https://journal.uwks.ac.id/index.php/sosioagribis/article/view/686/0
9.	Arahan Pengembangan Kawasan Industri	Dalam pengembangan kawasan industri yang ramah lingkungan harus tetap berpijak pada nilai arsitektur, denah bangunan industri dan struktur

	Berwawasan Lingkungan Di Kecamatan Ujung Jaya Kabupaten Sumedang. (S. Putra & Hindersah, 2017)	berbagai pabrik industri. Sebuah bangunan dapat di kembangkan dengan menerapkan konsep bangunan hijau (green building). Dengan arahan yang fokus pada pengembangan desain bangunan berkelanjutan dan prinsip perencanaan infrastruktur hijau. https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/PWK/article/view/8511
10.	Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Batam. (Wahyuniati, 2020)	Dalam mengatasi masalah kemiskinan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam menerapkan program pemberian bantuan pangan dan non tunai serta rehab rumah tidak layak huni. Namun strategi ini di rasa kurang efektif, implementasi program hanya sekedar memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin sehingga tidak mampu menekan angka kemiskinan di Kota Batam. http://repository.upbatam.ac.id/72/1/cover%20s.d%20bab%20III.pdf

Berdasarkan pada penelitian terdahulu fokus pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu berfokus pada implementasi strategi, program, atau kebijakan mencapai tujuan SDGs. Bagaimana peran kebijakan daerah dapat mengatasi masalah ekonomi (kemiskinan), lingkungan, dan tata ruang akibat adanya pembangunan perkotaan. Peneliti terdahulu menganalisis masalah penghambat pembangunan berkelanjutan di perkotaan dengan menerapkan beberapa pendekatan seperti pendekatan ekologi, pendekatan integratif, pendekatan pemberdayaan (*empowerment approach*), pendekatan sistem, dll.

Apabila di tarik benang merah terdapat persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu merujuk pada pencapaian pembangunan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan. Hal yang menarik

dari penelitian ini yang tidak di temukan dari penelitian-penelitian terdahulu adalah karakteristik yang dimiliki oleh Kota Batam sebagai kota industri. Kota industri di kenal sebagai penghasil limbah besar dengan persentase kerusakan lingkungan yang lebih tinggi. Untuk mencapai pembangunan SDGs yang menetapkan beberapa indikator keberlangsungan lingkungan hidup, menjadi tantangan baru yang tidak mudah untuk di implementasikan pada wilayah kota industri.

1.5. Kerangka Teori

1. *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* menurut Brundtland Report of the United Nations tahun 1987 adalah suatu proses pembangunan yang tidak hanya mencakup wilayah (*urban-rural*), tetapi juga seluruh elemen, ekonomi, masyarakat, dan lainnya yang mendasar pada prinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa harus mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. Brundtland Report melihat pembangunan berkelanjutan dari sisi kesetaraan (*equality*). Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memperhatikan kesejahteraan ekonomi, keberlanjutan sosial masyarakat, dan kualitas lingkungan hidup dengan masih menjamin terimplementasinya keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu memberikan peningkatan pada kualitas

hidup saat ini dan untuk generasi berikutnya (Patiung, 2019).
Yaitu pembangunan yang memperhatikan kesetaraan antar generasi (*intergenerational equity*).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terdiri dari tiga dimensi pembangunan yang terdiri dari dimensi lingkungan, dimensi sosial, dan dimensi ekonomi. Dikemas ke dalam tujuan SDGs yang terdiri dari 17 tujuan (Goals) yaitu; 1). Tanpa Kemiskinan; 2). Tanpa Kelaparan; 3). Kehidupan Sehat dan Sejahtera; 4). Pendidikan berkualitas; 5). Kesetaraan Gender; 6). Air Bersih dan Sanitasi Layak; 7). Energi Bersih dan Terjangkau; 8). Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; 9). Industri, Inovasi, dan Infrastruktur; 10). Berkurangnya Kesenjangan; 11). Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan; 12). Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; 13). Penanganan Perubahan Iklim; 14). Ekosistem Lautan; 15). Ekosistem Daratan; 16). Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; 17). Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan program pembangunan yang menggantikan peran Millenium Development Goals (MDGs) yang di rasa gagal dan kurang komprehensif karna target pembangunan sebatas mengurangi persentase dampak yang di timbulkan akibat faktor penghambat pembangunan berkelanjutan.

Konsep pembangunan berkelanjutan mengandung dimensi waktu yang berkaitan dengan apa yang terjadi dimasa yang akan datang. Pembangunan yang mengacu pada upaya mempertahankan kegiatan pembangunan secara terus menerus. Di katakan pembangunan berkelanjutan apabila memenuhi beberapa prinsip berikut (Suweda, 2011 dalam (R. P. Putra, 2015) :

- a. Keberlanjutan lingkungan, yaitu pembangunan yang memperhatikan ketersediaan sumber daya alam dengan memperhatikan daya dukung lingkungan (*carrying capacity*) untuk mengendalikan terjadinya over pembangunan.
- b. Keberlanjutan ekonomi, yaitu kondisi dimana sektor ekonomi mengalami kestabilan yang seimbang dalam rentang waktu yang lama, bahkan mampu memproduksi barang dan jasa secara berkelanjutan.
- c. Keberlanjutan sosial budaya, yaitu kondisi dimana prinsip keadilan, kesetaraan, dan kearifan local berlaku dan di minalkan dampak diskriminasi, penelantaran dan kekerasan.

Pembahasan pembangunan berkelanjutan secara global berkembang melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) berupa konsep serta capaian pembangunan. *Earth Summit 1992*, KTT Bumi pertama *Rio de Janeiro* dilakukan pada 3-14 Juni 1992 membahas isu utama yang masuk kedalam Agenda 21 dan

Deklarasi Rio yaitu masalah lingkungan hidup dan masalah pembangunan dengan hasil berupa konsep dari pembangunan berkelanjutan harus mampu memenuhi segala kebutuhan masyarakat pada generasi sekarang tanpa harus mengorbankan kebutuhan masyarakat yang ada di masa depan. Serta prinsip-prinsip Kehutanan, Konvensi Perubahan Iklim dan Konvensi Keanekaragaman Hayati (R. P. Putra, 2015).

Earth Summit 2002, KTT selanjutnya yang dilakukan setelah 10 tahun konferensi *Rio de Janeiro*, menghasilkan deklarasi Johannesburg 19 yaitu berupa kondisi dunia yang dapat memberikan ancaman terhadap pembangunan berkelanjutan. Tujuan dari konferensi ini adalah untuk mewujudkan solidaritas tanpa adanya deskriminasi ras, suku, agama, bahasa, budaya, atau tradisi dan peradaban dunia. *Earth Summit 2002* berkomitmen pada feminisme dan kesetaraan gender yang memang masih terkait dengan Agenda 21, Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs), dan rencana pelaksanaan KTT. Konferensi ini juga mendukung bentuk dari kerja sama antar mitra dalam pembangunan berkelanjutan secara regional dan internasional dengan meningkatkan kesempatan kerja melalui pemberian bantuan serta dukungan dari masyarakat adat (R. P. Putra, 2015).

United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20), yaitu konferensi internasional ketiga yang dilakukan

oleh Rio de Janeiro. Tujuan pembangunan berkelanjutan dari konferensi ini adalah menangani tantangan baru dengan pembaharuan komitmen pada beberapa aspek sebagai upaya mensejahterakan ekonomi dan lingkungan masyarakat umum. Target dari konferensi ini adalah mendukung tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan peralihan dari MDGs. Produk Domestik Bruto (PDB) dijadikan sebagai tolak ukur dari pembangunan berkelanjutan dalam memperhitungkan faktor sosial terutama faktor lingkungan (penyerapan karbon dan perlindungan habitat) akibat dari kegagalan MDGs dalam mencapai pengembangan lingkungan (R. P. Putra, 2015).

Pembangunan berkelanjutan (SDGs) berorientasi pada isu lingkungan. Dengan memperhatikan faktor kesejahteraan generasi yang akan datang, tetapi pada saat yang sama tidak mengabaikan peningkatan taraf hidup generasi sekarang (barbier,1993)(R. P. Putra, 2015). Dari sisi etika lingkungan, keberlanjutan mengikuti pandangan ekosentris, bukan pandangan antroposentris. Dengan berpegang teguh pada prinsip etika lingkungan hidup yang berperan penting dalam pembangunan berkelanjutan. Sehingga pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan melalui tujuan SDGs dengan goals pada aspek Air bersih dan sanitasi layak (6), energi bersih dan terjangkau (7), penanganan perubahan iklim (13), ekosistem

lautan (14), dan ekosistem daratan (15). Dengan tidak lupa melibatkan kemitraan (*partnership*) menjadi kolaborasi implementasi dari kebijakan pemerintah untuk mencapai kerjasama yang baik dalam mewujudkan terciptanya pembangunan berkelanjutan.

Aktivitas pembangunan berkelanjutan adalah yang memperhatikan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan seperti halnya yang disampaikan oleh Pearce dan Turner, yaitu:

- a. Sumber daya alam yang terbarukan (*renewable resource*) :
tingkat panen harus lebih rendah dari laju regenerasi (produksi berkelanjutan)
- b. Masalah lingkungan : jumlah emisi (limbah) harus lebih kecil atau sama dengan daya asimilasi lingkungan.

2. Manajemen Kota (*Urban Management*)

G.R Terry mendefinisikan manajemen sebagai proses tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan. Dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya (Fawahid, 2016). Manajemen secara luas didefinisikan sebagai kebijakan, rencana dan program untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan infrastruktur dasar, perumahan dan lapangan kerja. Lebih banyak akses bergantung pada inisiatif swasta dan perusahaan

swasta yang dipengaruhi oleh kebijakan dan tindakan publik. Sedangkan kebijakan dan tugas publik harus dilaksanakan oleh pemerintah.

Menurut SK Mendagri No. 65 tahun 1995, manajemen kota merupakan proses pengelolaan sumber daya kota oleh pejabat pemerintah yang berkaitan dengan bidang-bidang tata ruang, lahan, ekonomi, keuangan, lingkungan hidup, pelayanan jasa, investasi, prasarana, dan sarana perkotaan, untuk mewujudkan rencana pembangunan. Urban Management Programme (UMP) memperkenalkan konteks manajemen kota berorientasi pada penanganan masalah di perkotaan. Pengertian manajemen kota adalah pengelolaan kota madya yang difokuskan pada isu-isu terpenting yang diidentifikasi berdasarkan urgensi masalah yang menarik perhatian warga. Administrasi kota memiliki fungsi operasional, fungsi informasi, fungsi keuangan, fungsi pembangunan, fungsi sumber daya, fungsi pengembangan organisasi (R. P. Putra, 2015).

Lea dan Courtney menyebutkan bahwa pendekatan manajemen perkotaan dibedakan menjadi dua yaitu, pendekatan problem-oriented teknokratis dan pendekatan ekonomi politik struktural. Manajemen kota merupakan sebuah disiplin ilmu baru, dibutuhkan berbagai sudut pandang yang berbeda dalam melihat permasalahan perkotaan yang sangat kompleks sehingga

memunculkan beberapa pendekatan manajemen kota di antaranya :

- a. Pendekatan Jalan Tengah, yaitu sebagai bentuk kompromi antara pendekatan problem oriented teknokratis dan pendekatan ekonomi politik struktural. Dengan fokus pada peningkatan kinerja lembaga-lembaga untuk menyelesaikan permasalahan di perkotaan.
- b. Pendekatan Aspek Perencanaan Kota dan Ekonomi Politik, pendekatan ini bisa dilihat dari aktivitas manajemen pemerintah kota, menurut Devas dan Rakodi, 1993, yaitu berdasarkan pada survey dan analisa yang berupa estimasi dari kebutuhan sekarang dan yang akan datang dari aspek-aspek utama masalah di perkotaan, serta evaluasi dan respon dari masyarakat; pengembangan strategi dan kebijakan dengan mengidentifikasi isu-isu dan masalah kunci menjadi alternatif strategi dan kebijakan; implementasi; monitoring dan evaluasi.
- c. Pendekatan Holistik, disebut juga dengan pendekatan multidimensi kesisteman. Pendekatan ini bertujuan pada penyelesaian masalah secara tuntas sampai ke akar permasalahan. Bekerja sama dalam mengelola kota dengan berbagai pihak dan stakeholder. Untuk memahami permasalahan kota yang kompleks dibutuhkan pendekatan

sistem dengan indikator yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Ada 3 kriteria dasar penggunaan pendekatan holistik yaitu; Economically Viable (secara ekonomi menguntungkan), Environmentally Friendly (ramah terhadap lingkungan), dan Socially, Politically Acceptable and Culturally Sensitive (secara sosial dan politik diterima masyarakat dan sensitif terhadap budaya).

Manajemen Kota merupakan bentuk dari manajemen publik. Dalam konteks manajemen publik, pemerintah kota melakukan analisis masalah perkotaan untuk menciptakan perencanaan strategi dan kebijakan yang kreatif dan inovatif sebagai upaya dalam menekan masalah perkotaan. Sehingga perlu adanya kerjasama dari pemerintah kota dengan pihak stakeholder dan masyarakat berupa dukungan kegiatan imajinatif dan inovatif di dalam wilayah kota.

1.6 Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah unsur penelitian yang menjelaskan karakteristik masalah yang akan diteliti. Berdasarkan pada kerangka teori yang telah dijabarkan di atas ditemukan definisi konseptual dari teori di atas antara lain :

a. Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) atau yang disebut dengan pembangunan berkelanjutan, merupakan tujuan pencapaian

pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati secara global. Kemunculan SDGs dipelopori oleh masalah global yang semakin lama dirasa dapat merusak ekosistem dan lingkungan hidup yang ada di bumi. SDGs memiliki 17 tujuan (Goals) yang diharapkan dapat menjadi acuan pembangunan bagi negara-negara di dunia untuk meminimalisir dampak negatif yang akan terjadi kedepannya. Oleh karena itu pembangunan kota yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam harus berdasarkan pada SDGs/ berkelanjutan.

b. Manajemen Kota (Urban Management)

Manajemen kota adalah sebuah proses perencanaan, pergerakan, pengawasan, program kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kota yang memiliki fungsi operasional, fungsi informasi, fungsi keuangan, fungsi pengembangan, fungsi sumber daya, fungsi pengembangan organisasi sesuai pada estimasi dan kebutuhan kota saat ini hingga mendatang.

1.7 Definisi Operasional

Definisi operasional memberikan gambaran tentang pengukuran variabel atau sebagai acuan ketika suatu variable terjadi. Untuk memudahkan penulis menganalisa sehingga memberikan Batasan alat ukur suatu variabel. Berupa menjamin air bersih dan sanitasi layak untuk semua, energi bersih dan terjangkau dengan memastikan akses energi untuk semua, penangan perubahan iklim, ekosistem laut, ekosistem

darat dengan pengelolaan hutan, dan kemitraan dengan kerjasama antar lembaga untuk mencapai tujuan (Cahyani, 2020).

NO.	Variabel	Indikator	Parameter
1.	<i>Sustainabel Development Goals (SDGs)</i>	Kemitraan (<i>partnership</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Kerjasama yang melibatkan lembaga swasta. 2. Adanya program kerja yang melibatkan instansi pemerintah. 3. Adanya agenda dan kerjasama dengan lembaga lain.
		Air bersih dan sanitasi layak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin kualitas air yang digunakan. 2. Memberikan ruang daya tampung air yang cukup. 3. Pencegahan pencemaran air akibat sampah.
		Energi bersih dan terjangkau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin pasokan energi primer. 2. Mengikutsertakan peran energi baru untuk menjamin akses listrik rumah tangga
		Penanganan perubahan iklim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya seleksi ketat terhadap pembukaan lahan untuk kawasan industri. 2. Penghijauan pada Kawasan hutan gundul.
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Solusi terhadap krisis Tempat Pembuangan

		Ekosistem laut	Akhir (TPA) sampah. 2. Memiliki kapasitas penyediaan (<i>supportive capacity</i>), dan kapasitas tampung limbah (<i>assimilative capacity</i>).
		Ekosistem darat	1. Pelestarian hutan dengan menghentikan penebangan hutan 2. Program yang mengatasi pencemaran sungai, waduk, dan rawa akibat polusi sampah. 3. Memiliki kapasitas penyediaan (<i>supportive capacity</i>) dan daya tampung limbah (<i>assimilative capacity</i>).

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses terencana dan sistematis yang akan dilakukan oleh penulis dalam menentukan jawaban pemecahan masalah dari fenomena yang telah ditetapkan sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi :

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan atau melukiskan keadaan dari objek penelitian, baik seseorang, lembaga, atau masyarakat dengan di dasarkan pada hasil pengamatan dari peneliti serta memberikan argumentasi terhadap temuan lapangan dan dihubungkan dengan konsep teori pembangunan berkelanjutan, dan manajemen kota. Alasan memilih penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk menjawab rumusan masalah dengan mendeskripsikan keadaan yang akan diamati dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam. Teknik pengumpulan data yang biasanya digunakan oleh para peneliti dengan jenis penelitian kualitatif bersumber dari wawancara secara struktur, observasi, dokumentasi, dan informasi audiovisual dibanding hanya mengandalkan satu sumber data saja (Wahyuniati, 2020).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), tepatnya di kantor Bappeda Litbang Kota Batam yang berlokasi di kantor Wali Kota Batam Lt.6, Jl. Engku Putri No. 1, dan kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam di Jl. Ir. Sutami No. 1, Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam. Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah (Bappeda Litbang) Kota Batam adalah badan yang mengurus perihal rancangan

pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Batam yang disusun kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan persampahan.

3. Data Dan Sumber Data

a. Data primer

Data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli atau disebut sebagai data utama. Data primer biasanya berbentuk opini subyek secara individu atau kelompok yang didapatkan melalui metode wawancara dan observasi. Perolehan data primer pada penelitian ini didapatkan melalui proses wawancara kepada para informan Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam dan Dinas Lingkungan Hidup.

b. Data sekunder

Disebut sebagai data pendukung yang diperoleh melalui penelusuran dokumen atau arsip yang ada. Perolehan data sekunder didapatkan melalui ketersediaan data yang telah dipublikasikan oleh masyarakat, stakeholder, dan pemerintah daerah Kota Batam. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui media perantara yang berbentuk

situs, website, riset jurnal, artikel, skripsi, dan berita dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yang berkaitan dengan tantangan pembangunan kota berkelanjutan Pemerintah Kota Batam dalam mengimplementasikan konsep SDGs.

a. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara sebagai perolehan data primer dengan melakukan interaksi berupa tanya jawab kepada narasumber sebagai pihak informan yang dimintai keterangan, pendapat, serta ide yang lebih bebas dan terbuka terkait hal-hal yang dibutuhkan peneliti. Adapun pihak-pihak yang menjadi narasumber sebagai informan diantaranya :

1. Kepala Bappeda Litbang Kota Batam

Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam sebagai yang berperan dalam penyusunan perencanaan program pembangunan daerah Kota Batam sekaligus memiliki wewenang terkait perizinan

pembangunan perumahan dan perkotaan serta surat keterangan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR).

2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam

Yang mengatur urusan di bidang lingkungan hidup dan persampahan. Tugas pokok kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) adalah mengarahkan, merumuskan, membina, memantau, mengkoordinasikan, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan kota berdasarkan asas otonomi dan dukungan tugas lingkungan hidup.

3. PT. Bandar Abadi Shipyard

PT. Bandar Abadi Shipyard adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan kapal, perbaikan kapal, konversi kapal dan berbagai pekerjaan fabrikasi baja. Alasan memilih PT Bandar Abadi Shipyard di karenakan industri galangan kapal merupakan penghasil limbah B3 dengan volume terbesar di Kota Batam.

4. PT. Epson Batam

PT Epson Batam di kenal sebagai salah satu perusahaan besar di Kota Batam yang bergerak di bidang manufaktur dan elektronik. Alasan memilih PT Epson Batam di karenakan industri elektronik

adalah penghasil limbah B3 dengan jumlah industri terbanyak di Kota Batam.

5. Komunitas Akar Bumi Indonesia di Kota Batam

Akar Bumi Indonesia merupakan kelompok (NGO) yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Yang berisikan aktivitas dalam memelihara lingkungan hidup.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bukti nyata dari sebagai catatan peristiwa penelitian yang berbentuk foto-foto, dokumen, laporan kegiatan, dan berbagai data yang relevan dalam penelitian. Dokumentasi pada penelitian ini disajikan dengan bukti gambar berupa foto, dan hasil rekaman wawancara dengan informan berupa video dan audio.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan diolah menggunakan teknik analisis data menjadi hasil yang memiliki nilai dan makna yang lebih mudah di pahami. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terstruktur yaitu dengan melakukan *Redaksi Data*, *Penyajian Data*, dan *Penarikan Kesimpulan*.

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu pengolahan data dengan mengelompokkan data-data yang dibutuhkan dari hasil penelitian sebelum akhirnya digunakan sebagai laporan dalam data penelitian. Reduksi data bisa di katakan sebagai proses pemilahan data-data hasil wawancara yang akan digunakan oleh peneliti sebagai pendukung hasil penelitian. Reduksi data memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga membantu penelitian dalam mengumpulkan data-data selanjutnya. Proses pengelompokkan data bisa dilakukan dengan bantuan elektronik seperti leptop.

b. Penyajian Data

Setelah data dikelompokkan dan melewati tahap penyaringan pada reduksi data, data penelitian disajikan menggunakan pola hubungan agar semakin mudah untuk dipahami. Penyajian data pada penelitian deskriptif kualitatif adalah berbentuk teks yang bersifat naratif, namun juga dapat berbentuk grafik, matrik, dan chart.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data yaitu penarikan kesimpulan (Conclusion Drawing). Kesimpulan yang berisikan jawaban dari rumusan masalah yang sejak awal telah dirumuskan. Penarikan kesimpulan berupa temuan baru yang belum pernah ada dengan penggambaran

atau deskripsi suatu obyek penelitian yang sebelumnya masih belum jelas kepastiannya yang kemudian menjadi lebih jelas, dan dapat dipertanggung jawabkan.